

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Dewi Ariyanti¹, Nelly Masnila², Choiruddin³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia
Email: dewiariyanti526@gmail.com, nellymasnila@polsri.ac.id,
Choiruddin@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus baik secara simultan ataupun secara parsial mempengaruhi Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode *Sampling Jenuh* digunakan dalam pemilihan sampel sebanyak 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan total pengamatan yaitu 40 data observasi selama 4 tahun dari tahun 2018-2021. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan *SPSS versi 26*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Uji secara simultan menunjukkan hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi, Khusus terhadap Belanja Daerah

Abstract

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds either simultaneously or partially affecting Regional Expenditures in the Provinces of Sumatra Island. This type of research is quantitative research. The Saturated Sampling Method was used in selecting a sample of 10 provinces on Sumatra Island with a total of 40 observations for 4 years from 2018-2021. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with SPSS version 26. Based on the results of the study it is known that Local Own Revenue and Special Allocation Funds have no effect on Regional Expenditures, while General Allocation Funds have a positive effect on Regional Expenditures. Simultaneous tests show the results that the variables Regional Original Income, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds jointly affect Regional Expenditures.

Keywords: *Regional Own Revenue, General Allocation Fund, and Allocation Fund, Special for Regional Expenditure*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah menempuh babak baru dalam kehidupan masyarakatnya, dengan terdapatnya reformasi yang sudah

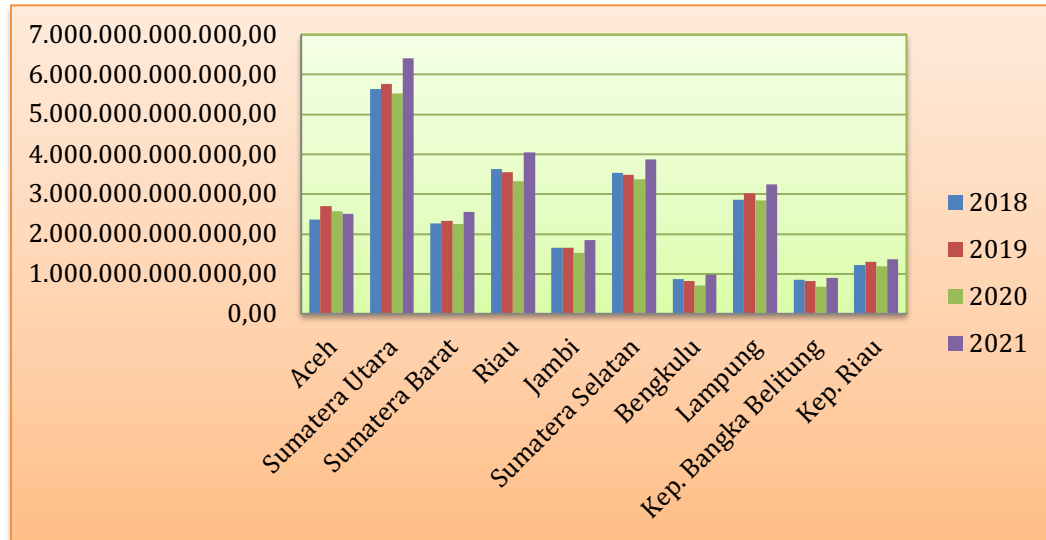
membawah suatu perubahan secara signifikan terhadap pola kehidupan dari segi sosial, politik ekonomi dan sektor publik. Dalam melakukan pembangunan daerah terdapat salah satu asas yang bersubungan

dengan pembiayaan daerah merupakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi diwujudkan dengan pemberlakuan otonomi daerah. Pesatnya perkembangan pada setiap daerah di Indonesia selaras dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah menekankan pada peran dan keahlian pemerintah daerah dalam pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, kewajiban terhadap daerah otonom yang dilakukan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dengan lajunya perkembangan daerah dan berkembangnya aktivitas perpajakan/fiskal yang membutuhkan suatu alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar serta pembangunan yang memerlukan ketersediaan dana dengan jumlah yang besar untuk mendanai aktivitas tersebut. Adapun fenomena yang terjadi pada pengalokasian anggaran belanja terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu daerah banyak mengalokasikan anggaran yang tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Berdasarkan pada fenomena tersebut terdapat permasalahan berbentuk kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak menyeluruh dalam mengalokasikan belanja daerahnya, sebagaimana daerah menampilkan tingkatan pertumbuhan yang tinggi serta sebagian lain menampilkan tingkatan pertumbuhan yang sangat rendah. Belanja pemerintah daerah (Belanja) yang dilaporkan

oleh pemerintah daerah dalam APBD merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah untuk mendanai aktivitas operasional di lingkungan pemerintah. Dengan pesatnya pengeluaran, sumber daya yang signifikan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

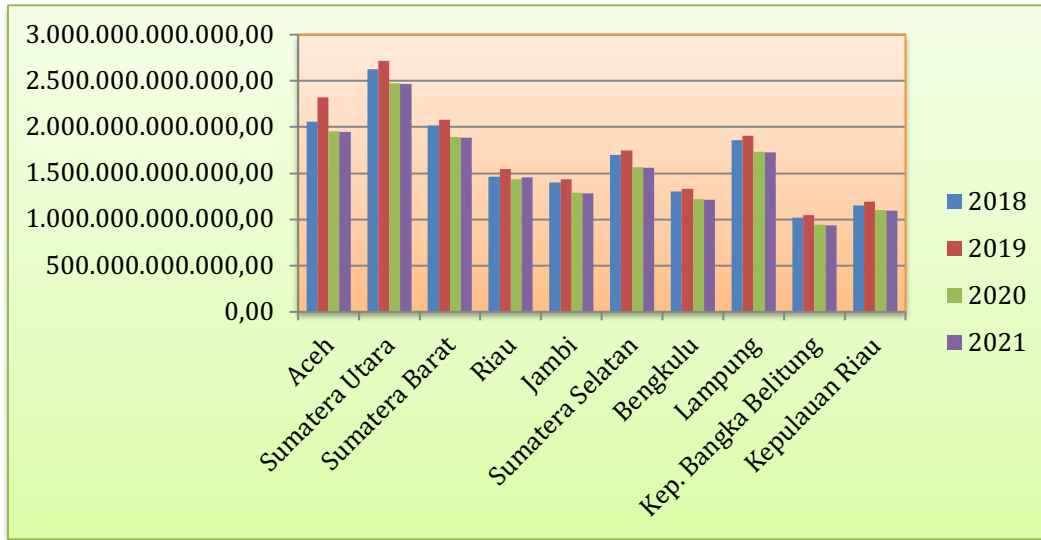
Dalam hal ini pendapatan asli daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang sah mempunyai kedudukan berarti dalam segi pembangunan di daerah. Sumber penerimaan daerah dapat dikelola sendiri oleh masing-masing daerah sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku. Pemerintah daerah juga dapat mengupayakan kenaikan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri, sehingga dapat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang baik sesuai dengan pengelolaan keuangan dana pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah, serta pajak. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda, dengan demikian akan menghasilkan suatu perbedaan antara penerimaan dan belanjanya. Dengan perbedaan potensi ini dapat mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Bagi pemerintah pusat, penyerahan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah seperti pendapatan dan belanja daerah merupakan hal yang penting dalam sebuah proses kelancaran otonomi daerah (Hamsiah, 2019). Penyerahan wewenang tersebut dapat terlihat realisasi PAD yang terjadi dengan meninjau hasil grafik realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera

Permasalahan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum sering muncul, dikarenakan terdapat suatu perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dipergunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan keuangan daerah. Dilihat dari perkembangannya, tingkat kemandirian pemerintah daerah justru tidak mengalami kenaikan, namun cenderung mengalami penurunan. Pemerintah daerah justru terlihat berpangku tangan terhadap dana transfer terutama dana alokasi umum untuk

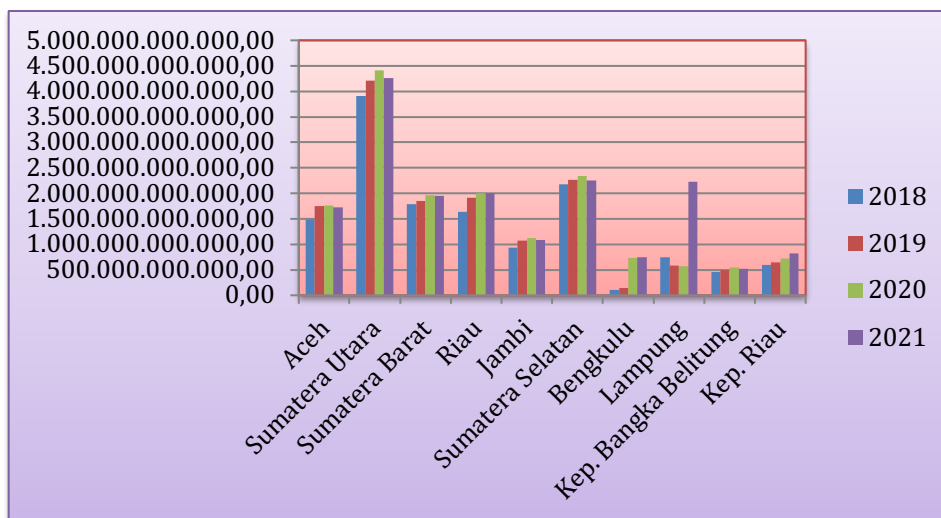
membiayai belanja daerahnya. Apabila dana alokasi umum meningkat maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah yang lebih besar. Kebijakan pemberian DAU justru menimbulkan kemasalahan fiskal daerah. Hal ini disebabkan daerah akan menerima transfer dana alokasi umum yang lebih kecil apabila mengalami kinerja fiskal yang lebih baik dalam hal ini ditandai dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah. Berikut grafik realisasi dana alokasi umum pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 1. Grafik Dana Alokasi Umum pada Provinsi di Pulau Sumatera

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/ kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana tersebut ditunjukkan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Kebutuhan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang menunjukkan

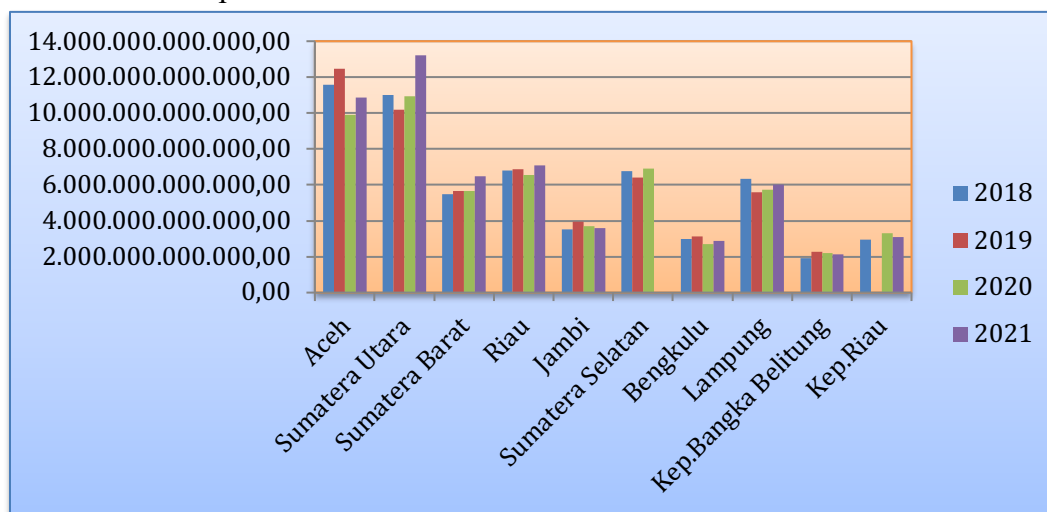
keperluan publik. Dana alokasi khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. DAK dikhususkan untuk pembangunan fisik daerah sedangkan DAK non fisik lebih cenderung digunakan untuk pembangunan selain fisik, seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan bantuan operasional kesehatan (BOK). Berikut grafik dana alokasi khusus (DAK) pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 2. Grafik Dana Alokasi Khusus pada Provinsi di Pulau Sumatera

Belanja daerah diperlukan dalam hal mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang penangannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan aktivitas rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai aktivitas operasional dalam

pemerintahan. Dalam hal ini belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar juga, agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka dapat diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan menjadi meningkat. Berikut ini grafik realisasi Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2021:



Gambar 3. Grafik Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera

Belanja daerah merupakan alokasi yang wajib dilakukan secara efektif dan efisien, serta belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terlebih dengan adanya otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:16). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini juga

sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah diambil dari tahun 2018-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan uji statistik

Kolmogorov-Smirnov Test untuk melakukan uji normalitas data dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji normalitas residual dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P – P Plot of Regression Standardized Residual*. Berikut ini hasil uji normalitas:

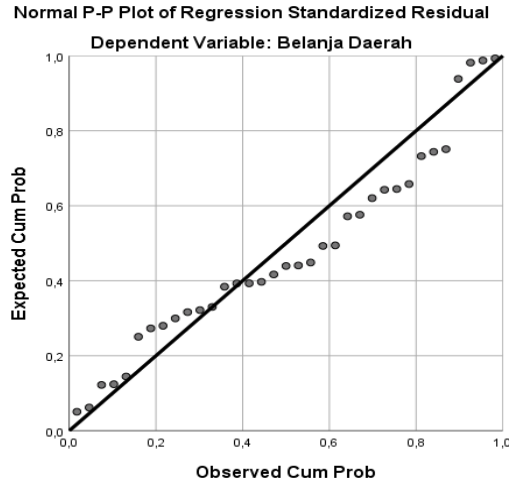
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000209
	Std. Deviation	141571026100
		908,759500
Most Extreme Differences	Absolute	,135
	Positive	,135
	Negative	-,098
Test Statistic		,135
Asymp. Sig. (2-tailed)		,106 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS peneliti (S023)

Hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dalam tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan uji normalitas metode kolmogorov smirnov

sebesar 0,106 atau lebih besar dari 0,05 artinya data pada penelitian ini terdistribusi normal. Berikut ini grafik scatterplots disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Scatterplots
Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari uji Kolmogorov Smirnov.

Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau

mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasi 1 atau mendekati 1). Metode uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,043E+12	1,058E+12		-2,878	,007		
	Pendapatan Asli Daerah	,479	,430	,197	1,113	,274	,251	3,979
	Dana Alokasi Umum	4,597	,907	,662	5,066	,000	,461	2,169
	Dana Alokasi Khusus	,247	,612	,070	,403	,690	,261	3,831

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS Peneliti (2023)

Dari tabel 4. diatas, dapat diketahui bahwa nilai Tolerance ketiga variabel lebih daro 0,10. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan.

Hasil Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:107), “menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan

penggunaan pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)”. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Bila $DU < DW < 4 - DU$ maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai $DW < DL$ maka terjadi autokorelasi positif, dan jika nilai $DW > 4 - DU$ maka terjadi autokorelasi negatif. Bila DW terletak di antara DU dan DL maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Hasil Uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,869 ^a	,756	,732	1482630710 692,10000	2,394

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS Penelitian (2023)

Dari hasil uji autokorelasi tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi dengan, di dapat nilai DW sebesar 2,394 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) adalah 35, serta jumlah variabel independen (k) adalah 3 diperoleh daro dL 1,2833 dan dU sebesar 1,6528. Nilai $4 - dL = 2,7167$ dan nilai $4 - dU = 2,3472$. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi di dalam penelitian ini karena nilai $dU < dW < 4 - dU$ dengan nilai $1,6528 < 2,394 < 2,7167$ sehingga data penelitian tidak terjadi autokorelasi atau lolos uji autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedestisitas

Hasil heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara lain prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu yang teratur, maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

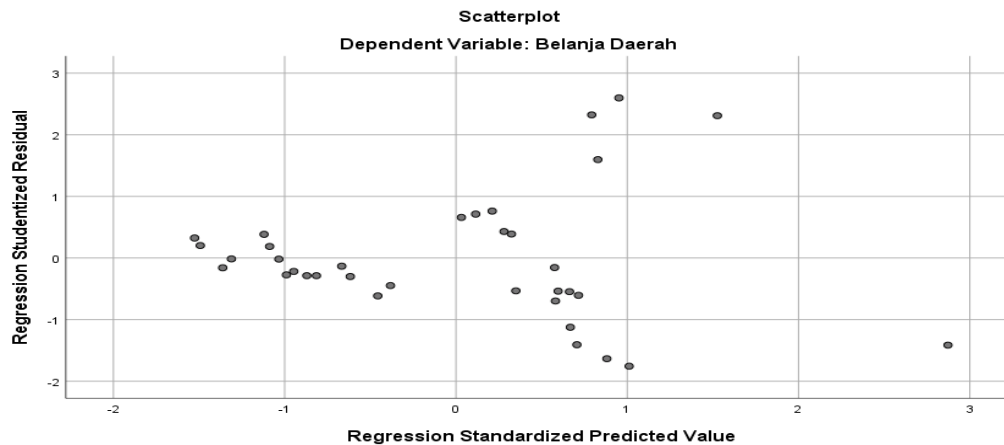
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3,043E+12	1,058E+12		-2,878	,007		
	Pendapatan Asli Daerah	,479	,430	,197	1,113	,274	,251	3,979
	Dana Alokasi Umum	4,597	,907	,662	5,066	,000	,461	2,169
	Dana Alokasi Khusus	,247	,612	,070	,403	,690	,261	3,831

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Output SPSS Peneliti (2023)

Dari tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya untuk menguji lebih lanjut mengenai heteroskedastisitas dapat dilihat Gambar 4.2 berikut:



Gambar 6. Grafik Scatterplots Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS Peneliti (2023)

Dari gambar 6 Scatterplot-Uji Heteroskedastisitas di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas, di bawah, dan disekitaran angka nol. Kemudian titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah, dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Pengujian secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil output regresi dengan SPSS akan menunjukkan nilai t hitung dan signifikansinya. Hasil uji parsial (t) dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 5. Hasil Signifikansi Nilai t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize	T	Sig.
	B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1 (Constant)	-	1057624646		-2,878	,007
	3043452446	479,416			
	242,665				
Pendapatan Asli Daerah (X1)	,479	,430	,197	1,113	,274
Dana Alokasi Umum (X2)	4,597	,907	,662	5,066	,000
Dana Alokasi Khusus (X3)	,247	,612	,070	,403	,690

a. Dependent Variable: Belanja Daerah (Y)

Sumber: Output SPSS Penelitian (2023)

Berdasarkan tabel 9 maka dapat dilihat nilai t-hitung dan derajat signifikansi tiap variabel independen (X1, X2, dan X3) yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan output SPSS versi 26 for windows didapatkan nilai t-hitung variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 1,113. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-3-1=31$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1,69552. Karena nilai t-hitung $<$ t-tabel atau $1,113 < 1,69552$. Berdasarkan uji signifikansi pada uji-t $>$ 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.8) dengan nilai signifikansi sebesar 0,274. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y).
2. Berdasarkan output SPSS versi 26 for windows didapatkan nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Umum (X2)

sebesar 5,066. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df= 35-3-1=31$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1,69552. Karena nilai t-hitung $>$ t-tabel atau $5,066 > 1,69552$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah. Dari uji signifikansi pada uji-t $<$ 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.8) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

3. Berdasarkan output SPSS versi 26 for windows didapatkan nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0,403. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-3-1=31$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1,69552. Karena nilai t-hitung $<$ t-tabel atau $0,403 < 1,69552$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak memiliki pengaruh secara parsial. Berdasarkan uji signifikansi pada uji-t

>0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.8) dengan nilai signifikansi sebesar 0,690. Dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2018:98), “Uji-F merupakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen”. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama atau simultan independen yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi umum, dan Dana Alokasi Khusus di dalam

penelitian mempengaruhi variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Untuk melihat pengaruhnya dari nilai Signifikansi F. Apabila nilai Signifikansi $F < 0,05$ maka ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terkait, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $F > 0,05$ maka tidak ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terkait. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah variabel berpengaruh secara signifikansi atau tidak terhadap Belanja Daerah. Berikut hasil uji statistik F disajikan di Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2110196613	3	7033988710	31,999	,000 ^b
	n	2015160000		6717195000		
		000000,00		000000,000		
		0				
	Residual	6814400855	31	2198193824		
		2908210000		2873617000		
		000000,000		000000,000		
	Total	2791636698	34			
		7305980000				
		000000,00				
		0				

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 26 (diolah, 2023)

Dari tabel 10 diatas, dari nilai Sig. sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $F < 0,05$ yang berarti secara simultan atau berama-sama variabel independen didalam penelitian mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji signifikansi-F terdapat nilai F-hitung yaitu sebesar 31,999. Untuk menentukan F-tabel, dapat dilihat pada tabel distribusi nilai tabel-

$F < 0,05$ dengan rumus $n-k-1$ yaitu $35-3-1=31$ dengan keterangan k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah data yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari tabel distribusi Nilai F-Probability $< 0,05$, dalam penelitian hasil signifikansi-F adalah 0,000 Nilai F-hitung $> F$ -tabel yaitu $31,999 > 2,91$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian yang dilakukan dalam semua variabel independen memiliki beranekaragam kesimpulan baik dalam signifikansi maupun arah korelasi. Penelitian merasa perlunya membandingkan hasil penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang dijadikan latar belakang atau pendukung penelitian. Pembahasan untuk setiap hasil uji hipotesis pada penelitian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

H₀= Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H₁= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan menggunakan uji t, diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (b_1) adalah sebesar 0,197 bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,274 yang lebih besar dari 0,05. Nilai t-hitung untuk Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 1,113, jika dibandingkan dengan nilai t-tabel adalah sebesar 1,69552. Oleh karena itu t-hitung < t-tabel atau $1,113 < 1,69552$ dan Signifikansi $p = 0,274 > 0,05$ maka hipotesis pertama ditolak. Dari hasil uji-t ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak memiliki berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima. Hal ini berarti H₀ diterima atau H_a ditolak. Besarnya pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah 0,197 atau 19,7%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel X₁ memiliki pengaruh sebesar 19,7% terhadap variabel Y. Hipotesis 0 yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah penelitian Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021), yang menyatakan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini dapat disebabkan terjadinya *Flaypaper Effect*, karena sesuai dengan hipotesisnya menyatakan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang diterima pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu unsur pembentukan pendapatan daerah yaitu hasil dari potensi daerah itu sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja daerah maka harus benar-benar disesuaikan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

H₀= Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H₁= Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (b_2) adalah 0,662 bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t-tabel sebesar 1,69552. Oleh karena itu t-hitung > t-tabel atau $5,066 > 1,69552$ dan Signifikansi $p = 0,000 > 0,05$ maka hipotesis kedua diterima. Ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Dana Alokasi

Umum terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Dari hasil uji-t diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja Daerah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian penelitian dengan penelitian Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022) dan Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021).

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasi dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan suatu konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini merupakan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan. Dari dana tersebut pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Dengan ini hasil menjelaskan bahwa provinsi yang mendapat dana alokasi umum (dau) yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam penggunaan Dana Alokasi Umum diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerah

untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.

Dari hasil uji-t Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dana Alokasi Umum memberikan dampak pada peningkatan Belanja Daerah (Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. 2022). Dana Alokasi Umum yang tinggi dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki desentralisasi fiskal yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengeluaran daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

H0= Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

H1= Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (b_3) adalah sebesar 0,070 bertanda matematik positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,690 yang lebih besar dari 0,05. Nilai t-tabel sebesar 1,69552. Oleh karena itu $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $0,403 < 1,69552$ dan Signifikansi $p = 0,690 > 0,05$ maka hipotesis ketiga ditolak. Dari hasil uji-t ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak memiliki berpengaruh terhadap Belanja Daerah diterima. Ini berarti tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Dana Alokasi Khusus terhadap

Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Hasil Penelitian ini selaras dengan penelitian Mbuinga, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Khusus merupakan bantuan yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk suatu daerah tertentu bertujuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi keperluan daerah dengan mengikuti kebijakan dan program pembangunan nasional berdasarkan UU No.33 Tahun 2004. Dana Alokasi Khusus biasanya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur-infrastruktur publik seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan daerah. Dalam hal ini jika suatu daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang lebih tinggi dari pemerintah pusat, maka pemerintah akan mengeluarkannya pada pos belanja barang dan jasa, sehingga dapat membuat kucuran belanja daerah meningkat.

Berdasarkan hasil uji-t Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hipotesis 0 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kecilnya Dana Alokasi Khusus yang di dapat oleh Provinsi di Pulau Sumatera, selain itu kebutuhan sulit diperkirakan dengan alokasi umum sedangkan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional. Namun pemerintah daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fiskal. Dana Pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Dengan adanya perencanaan yang baik dari pihak pemerintah daerah, maka Dana Alokasi Khusus tersebut dapat dioptimalkan pada infrastruktur-infrastruktur yang potensial sehingga

kesejahteraan rakyat meningkat dengan adanya belanja daerah tersebut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Uji Simultan (Uji-F) yang dilakukan menghasilkan $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ yaitu $31,999 > 2,91$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi probability-F yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2018-2021. Kemudian hasil $R\text{ Square}$ yang didapat dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dalam memberikan pengaruh terhadap Belanja Daerah. Dalam hal ini nilai $R\text{ Square}$ didapatkan sebesar 75,6% menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi khusus pada penelitian ini cukup kuat terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Pulau Sumatera, sisanya 24,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel yang tidak dianalisis dan diuji dalam penelitian ini. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, adalah kewajiban dalam satu (1) tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai penerapan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi ataupun kewenangan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib serta urusan pilihan yang ditetapkan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Menurut Ernayani, R. (2017). Menunjukkan “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/ Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dalam hasil uji secara parsial (Uji T) variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai t-hitung sebesar 1,113 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,69552, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,274 maka nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan untuk variabel independen Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam hasil uji secara parsial (Uji T) variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5,066 lebih besar dari t-tabel 1,69552, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 maka nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan untuk variabel independen Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja daerah. Dalam hasil uji secara parsial (Uji T) variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai t-hitung sebesar 0,403 lebih kecil dari t-tabel 1,69552, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,690 maka nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama atau secara simultan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen Belanja Daerah memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 serta F-hitung lebih besar dari F-tabel 3,999 > 2,91. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, W. D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Equity*, 22(2), 197-214.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44-52.
- Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 1-13.
- Mbingua, F., Karundeng, D. R., & Suyanto, M. A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi

- Hasil Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3203-3213.
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal eksplorasi akuntansi*, 2(2), 2826-2838.
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 78-88.
- Putra, I., & Ratna, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(3), 1-14.
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alphabet.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 19, No. 7.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465-472.